



Perkembangan Masyarakat Transmigran Desa Jangga Baru, Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi (1983-1998)

Novia Roza Simatupang ^{1*}

¹ Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

* E-mail: noviaroza.simatupang19@mhs.uinjkt.ac.id

Citation: Simatupang, Novia Roza. "Perkembangan Masyarakat Transmigran Desa Jangga Baru, Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi (1983-1998)". *Socio Historica* 2023, Vol. 2, No. 1. DOI:

<https://doi.org/10.15408/sh.v2i1.31558>

Publisher's Note: Socio Historica stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to analyze the development of the transmigration community in Jangga Baru Village, Batin XXIV District, Batang Hari Regency, Jambi Province. This research uses historical methods and social anthropology approaches to achieve this goal. The data for this writing was obtained through interviews and literature studies related to transmigration and rural area development. This research indicates that ninety percent of the population in Jangga Baru Village are transmigrants originating from various regions in Java Island. They underwent transmigration in 1983 with the aim of attaining a better life. Through the transmigration program known as PIR (Perkebunan Inti Rakyat), the initial settlement and development of the transmigration community in Jangga Baru Village were facilitated by the Ministry of Transmigration in terms of social welfare, and economically supported by PT. Perkebunan Nusantara VI Durian Luncuk. In 1993, Unit I transformed into a definitive village. This was marked by the transition of Unit I's supervision from the Ministry of Transmigration to Jangga Baru Village under the auspices of the Provincial Government of Jambi. It is also known that various religious rituals, which serve as cultural instruments there, function as social cohesion factors that can create unity within a diverse society in terms of ethnicity and place of origin from an anthropological perspective.

Keywords: *Development, Transmigration, PIR-Trans, Village, Jangga Baru*

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan masyarakat transmigrasi Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode sejarah dan pendekatan antropologi sosial. Data dalam penulisan ini didapatkan melalui wawancara dan studi pustaka terkait literatur yang berkaitan dengan transmigrasi dan pengembangan kawasan pedesaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sembilan puluh persen masyarakat Desa Jangga Baru merupakan masyarakat transmigran yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Mereka melakukan transmigrasi pada tahun 1983 untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Melalui transmigrasi pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat), kehidupan awal masyarakat transmigrasi desa Jangga Baru dimotori oleh Kementerian Transmigrasi dalam hal sosial kemasyarakatan dan dibina oleh PT.

Perkebunan Nusantara VI Durian Luncuk dalam hal sosial ekonomi. Pada tahun 1993 unit I bertransformasi menjadi desa definitif. Hal ini ditandai dengan beralih naungan Unit I dari kementerian Transmigrasi menjadi desa Jangga Baru di bawah naungan pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Diketahui pula bahwa aneka ritual keagamaan yang menjadi instrumen budaya di sana, berfungsi sebagai perekat sosial, yang secara antropologis dapat menciptakan persatuan di dalam masyarakat yang berbeda secara etnis dan daerah asal.

Kata Kunci: Perkembangan, Transmigrasi, PIR-Trans, Desa, Jangga Baru

1. Pendahuluan

Desa merupakan salah satu bentuk organisasi sosial yang keberadaannya telah lama muncul sebelum terbentuknya negara modern masa kini.¹ Sebagai kategori masyarakat yang kompleks, desa muncul beriringan dengan terbentuknya negara tradisional atau kerajaan. Desa tidak serta merta terbentuk begitu saja, namun melawati tahapan evolusi yang begitu panjang. Berdasarkan teori evolusi organisasi masyarakat, akhir dari evolusi organisasi masyarakat adalah terbentuknya negara (*state*) yang menurut Service dan Lewellen melalui empat tahapan, pertama gerombolan (*bands*), kedua kesukuan (*tribes*), ketiga kedaduan (*chiefdom*) dan puncaknya adalah terbentuknya negara tradisional (*state*).²

Sistem berladang (*slash and burn cultivation/ extensive cultivation*) yang identik dengan konotasi pedesaan berubah menjadi pertanian intensif (*irrigation system*) yang dipadukan dengan pemeliharaan ternak dan ikan menyebabkan munculnya tipe negara atau *state* sekitar 3700-1700 SM yang lalu di Timur Tengah dan Mesir.³ Dengan kata lain, pada ribuan tahun yang lalu desa menjadi fondasi terbentuknya negara. Berbeda dengan terbentuknya desa yang menjadi fondasi terbentuknya negara (*state*) pada ribuan tahun yang lalu, banyak kawasan desa di Indonesia sengaja dibentuk oleh pemerintah, dengan artian negara yang membentuk desa, salah satunya yaitu melalui program transmigrasi.

Menurut data dari Kementerian Pertanian, hingga tahun 2016 program transmigrasi telah memacu terbentuknya 3.055 desa di Indonesia, sebanyak 1.183 diantaranya telah menjadi desa definitif yang diakui oleh pemerintah, bahkan 385 permukiman transmigrasi juga telah bertransformasi menjadi ibukota kecamatan. Lebih jauh, program transmigrasi juga telah merangsang pembentukan ibukota kabupaten/ kota. Berdasarkan data, terdapat 104 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi ibukota kabupaten/ kota. Lebih dari itu, program transmigrasi juga telah memacu pembentukan dua ibukota provinsi baru, pertama, Mamuju yang kini menjadi

¹ Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan* (Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Deepublish, 2016), 7.

² Permana, 10.

³ Permana, 10.

Ibukota Sulawesi Barat, kedua, Ibukota Kalimantan Utara, yakni Bulungan. Kedua kota ini tercipta dari pengembangan kawasan transmigrasi.⁴

Transmigrasi merupakan salah satu program warisan pemerintah kolonial yang masih langgeng hingga saat ini. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda transmigrasi disebut sebagai kolonisasi dan menjadi rangkaian dari kebijakan politik etis. Setelah kemerdekaan, program kolonisasi diteruskan oleh Pemerintah Indonesia tetapi namanya diubah menjadi transmigrasi. Menurut Amral Syamsu Pelaksanaan transmigrasi oleh Pemerintahan Indonesia hingga tahun 1955 dianggap tidak membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya target-target yang direncanakan sebelumnya.⁵ Baru pada masa pemerintahan Orde Baru transmigrasi dapat dijalankan dengan sistem yang lebih mapan, bahkan menjadi program unggulan pada masa itu. Hal ini disebabkan karena perubahan orientasi transmigrasi pada masa itu yang diarahkan pada tujuan-tujuan non demografis.

Undang-Undang No.3 Tahun 1972 menegaskan bahwa tujuan transmigrasi adalah peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional. Perubahan orientasi program transmigrasi ke arah pembangunan daerah ini menyebabkan permukiman transmigrasi ditata untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan daerah.⁶

Salah satu sistem transmigrasi yang berhasil diterapkan pada masa orde baru ini adalah pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Transmigrasi Pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) merupakan kolaborasi pola pengembangan perkebunan dengan program transmigrasi yang dijalankan pemerintah. Transmigrasi pola PIR dikonsepsikan sebagai *political economic* yang terlihat dengan adanya distribusi insentif (keuntungan) antara inti dan plasma melalui hubungan kerja kemitraan yang mengakibatkan hubungan yang saling menguntungkan dan ketergantungan antara perkebunan inti dan perkebunan rakyat sebagai plasma.⁷ Selain itu, Program Transmigrasi PIR merupakan cerminan dari pelaksanaan demokrasi ekonomi yang ditandai dengan pendistribusian aset dengan nafas pemerataan.⁸

Di Provinsi Jambi pelaksanaan transmigrasi dengan pola PIR diselenggarakan sekitar 20 tahun, yaitu sejak 1982 hingga 2002. Selama 20 tahun pelaksanaan transmigrasi

⁴ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Transmigrasi Mendukung Terwujudnya Desa Mandiri dan Percepatan Pertumbuhan Wilayah," 2016, accessed June 14, 2022, <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1863>.

⁵ M. Amral Syamsu, "Penyelenggaraan Kolonisasi dan Transmigrasi," dalam *Transmigrasi dari Kolonisasi Sampai Swakarsa* (Jakarta: Gramedia, 1982), 16.

⁶ Diah Eka Poespaningroem, *Sipukat Solusi Perencanaan Transmigrasi* (Bogor: Zenawa Publishing House, 2021), 2.

⁷ Direktorat Pendayagunaan Lingkungan Pemukiman Departemen Transmigrasi, "Hasil Pra Seminar Dampak Pelaksanaan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Terhadap Kesejahteraan Transmigran," Hasil Pra Seminar (Jakarta: Direktorat Pendayagunaan Lingkungan Pemukiman Departemen Transmigrasi, Desember 1990).

⁸ Direktorat Pendayagunaan Lingkungan Pemukiman Departemen Transmigrasi.

PIR di Provinsi Jambi telah ditempatkan 28.963 KK yang dimukimkan di 65 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).⁹

Salah satu daerah penempatan Transmigrasi dengan pola PIR adalah kawasan yang saat ini bernama Desa Jangga Baru yang terletak di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Ada dua komponen utama dalam pola PIR, yaitu Perusahaan Inti dan Plasma (perkebunan rakyat). Dalam kaitannya dengan pembentukan Desa Jangga Baru yang dilatarbelakangi oleh program transmigrasi pola PIR, perusahaan inti yang menjembatani terbentuknya Desa Jangga Baru adalah PT. Perkebunan Nusantara VI Durian Luncuk. Lalu, bagaimana perkembangan masyarakat desa yang tidak terbentuk secara alami, melainkan melalui desain pemerintah melalui program transmigrasi ini? Oleh karenanya tulisan ini akan membahas salah satu perkembangan desa eks transmigrasi pola PIR, dengan studi ruang desa Jangga Baru, kecamatan Batin XXIV, kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dan dalam kurun waktu tahun 1983-1998.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi antar individu maupun kelompok dan lembaga dalam hal sosial ekonomi maupun kemasyarakatan penduduk desa, serta transformasi unit pemukiman transmigrasi menjadi desa definitif dan perkembangan setelahnya.

2. Metode Penelitian

Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu terdiri dari empat proses. Pertama heuristik atau pengumpulam sumber, kedua kritik/verifikasi, ketiga interpretasi dan keempat historiografi atau penulisan. Dalam ilmu sejarah, yang dimaksud dengan sumber yaitu sumber sejarah yang tersebar berupa catatan, kesaksian dan fakta-fakta lain yang memberikan penggambaran tentang sebuah peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia.¹⁰ Pada penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh sumber primer, yaitu dengan metode wawancara dan mengunjungi situs material berupa bangunan dan alat-alat pertanian yang diberikan kepada transmigran.

Selain data lapangan, untuk memperkokoh studi ini digunakan pula sumber-sumber sekunder yang diperoleh melalui *literature research*. Mengenai Transmigrasi di Provinsi Jambi, Junaidi pernah melakukan penelitian disertasi dengan judul *Perkembangan Desa-Desa Eks Transmigrasi dan Interaksi dengan Wilayah Sekitarnya serta Kebijakan Kedepan (Kajian di Provinsi Jambi)*. Kajian Junaidi bersifat global dan cenderung bersifat ekonomis, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada satu desa dengan perspektif sejarah. Terdapat pula artikel jurnal karya Krismonita Sandi, Irhas Fansuri dan Fatonah yang berjudul "Dinamika Masyarakat Rimbo Ilir

⁹ Junaidi, "Perkembangan Desa-Desa Eks Transmigrasi dan Interaksi dengan Wilayah Sekitarnya serta Kebijakan ke Depan (Kajian di Provinsi Jambi)" (Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2012), 152.

¹⁰ Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, edisi kedua. (Depok: Kencana, 2018), 219.

Kabupaten Tebo Tahun 1978-2016.”¹¹ Artikel ini membahas pemukiman transmigrasi di kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo serta dinamika kehidupan sosial masyarakatnya, tetapi jenis transmigrasi di Rimbo Ilir merupakan sistem bedol desa akibat pembangunan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri sehingga masyarakat terdampak mau tidak mau menjalani transmigrasi sebagai kompensasi dan dapat disimpulkan bahwa transmigran awal di kecamatan ini hanya berasal dari satu daerah. Pada penelitian ini transmigrasi yang dijalankan oleh masyarakat Jangga Baru adalah dengan sistem PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan transmigran berasal dari berbagai daerah di pulau Jawa yang berangkat secara suka rela.

Dalam penelitian ini, penulis memandang masyarakat Jangga Baru sebagai suatu kesatuan hidup setempat atau *community* (organisasi masyarakat) yang di dalamnya terjadi berbagai interaksi. Interpretasi dilakukan dengan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural oleh Bronislaw Malinowski. Inti dari teori ini adalah pendirian bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Selain sebagai bentuk pemuasan, aktivitas kebudayaan juga terjadi karena kombinasi beberapa macam *human needs* (kebutuhan manusia).¹²

Dengan teori yang dikembangkan oleh Molinowski ini, dapat dianalisis perkembangan masyarakat desa Jangga Baru yang merupakan suatu komunitas yang terbentuk karena program transmigrasi. Di dalam masyarakat yang baru terbentuk ini tentunya terjadi interaksi atas dasar pemuasan maupun kebutuhan utamanya kepada PTPN IV Durian Luncuk yang menjadi tampuk pembentukan wajah perekonomian masyarakat desa Jangga Baru maupun interaksi antar sesama masyarakat yang bersifat multikultural sebab program transmigrasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. PTPN VI Kebun Durian Luncuk dan Masyarakat Transmigran

Terdapat dua unsur utama dalam pelaksanaan transmigrasi pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), yaitu perusahaan inti (perkebunan inti) dan plasma. Perusahaan inti merupakan perusahaan perkebunan besar, baik milik Swasta maupun milik Negara, sementara itu plasma adalah area yang menjadi pemukiman, lokasi lahan pangan dan perkebunan rakyat yang ditujukan untuk transmigran peserta PIR. Dalam kaitannya dengan pembentukan Desa Jangga Baru yang dilatarbelakangi program transmigrasi pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat), perusahaan inti yang menjembatani terbentuknya Desa Jangga Baru adalah PT. Perkebunan Nusantara VI Durian Luncuk.

¹¹ Krismonita Sandi, Irhas Fansuri Mursal, dan Fatonah Fatonah, “Dinamika Masyarakat Transmigrasi Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 1978-2016,” *Jurnal Siginjai* 1, no. 1 (2021): 54–72.

¹² Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Cet. 2 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987), 171.

PTPN VI Kebun Durian Luncuk merupakan perusahaan agribisnis dengan pola kemitraan yang terletak di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari seluas 2.207,3 Ha dan Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun seluas 2.216,7 Ha. Jarak perkebunan ini dari Kota Muara Bulian sebagai ibukota kabupaten Batang Hari sekitar 60 km, sementara jarak dari Kota Sarolangun sekitar 95 Km dan jarak dengan ibukota Provinsi sejauh 125 km.¹³

Perkebunan ini berasal berasal dari hutan Negara semula HPH PT. Tanjung Asa yang pada Tahun 1980 Menteri Pertanian menunjuk PTP.VI (Persero) Pabatu, Sumatera Utara untuk membangun Perkebunan karet.¹⁴ Hal ini menyebabkan banyak tenaga kerja di perkebunan inti yang didatangkan dari Sumatera Utara yang memang perkebunan disana telah berkembang sejak masa kolonial.

Perkebunan inti membangun jalan dan rumah-rumah penduduk untuk calon transmigran yang datang pada akhir tahun 1983. Sejak saat itu, perkebunan inti bersama pemerintah pusat melalui Departemen Transmigrasi telah membuka delapan desa baru yang mana empat desa terletak di kabupaten Batang Hari dan empat desa lainnya masuk ke dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Desa-desa tersebut adalah Jangga Baru sebagai desa pertama dan sekaligus tempat kantor perkebunan inti, kemudian menyusul secara berurutan desa Terentang Baru, Petiduran Baru, Guruh Baru, Butang Baru, Meranti Baru, Bulian Baru dan Jati Baru.



Gambar 1 : Bagian depan rumah yang dibuat oleh PTPN

VI Durian Luncuk dan Departemen Transmigrasi

Sumber : koleksi pribadi penulis



Gambar 2 : Bagian samping rumah yang dibuat oleh PTPN VI

Durian Luncuk dan Departemen Transmigrasi

Sumber : koleksi pribadi penulis

PTPN VI Durian Luncuk sebagai perusahaan Inti menyediakan areal seluas rata-rata 3 ha kepada setiap Kepala Keluarga, dengan rincian 2 Ha lahan pokok/pertanian, 0,75 Ha lahan pangan dan 0,25 Ha lahan pekarangan (tanah perumahan). Masyarakat transmigran kemudian membayar tanah tersebut kepada pihak perkebunan dengan sistem kredit. yang mana sejak akhir tahun 1983, yaitu sejak masa awal penempatan hingga tahun 1988 masyarakat memperoleh pendapatan dengan bekerja di

¹³ PT Perkebunan Nusantara VI, "Unit Usaha Durian Luncuk - PTPN 6," Selayang Pandang, *ptpn6.com*, 2020, <http://ptpn6.com/statis-10/unit-usaha-durian-luncuk.html>.

¹⁴ PT Perkebunan Nusantara VI.

perkebunan yang baru digarap itu. Pada tahun 1983 perkebunan inti menjadikan pohon karet sebagai komoditasnya begitu pula masyarakat transmigran yang tinggal di sekitar areal perkebunan, mereka mengandalkan karet sebagai tanaman perkebunannya.

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 11 tanggal 14 Pebruari 1996 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 165/KMK.016/1996, tanggal 11 Maret 1996, dengan diadakannya Konsolidasi seluruh PTP yang ada di Indonesia, eks. PTP.VI dan PTP lainnya yang ada di wilayah Sumbar-Jambi disatukan menjadi PTP. Nusantara VI.¹⁵

Pada tahun 1996 ini pula komoditas perkebunan digantikan dengan kelapa sawit.¹⁶ Hal ini sejalan dengan ambisi pemerintah pusat pada masa itu, yakni menjadikan industri kelapa sawit sebagai program primadona. Oleh karena itu, Pemerintah pusat mengadakan kebijakan akselerasi pengembangan kelapa sawit sebagai upaya untuk dapat meningkatkan dan menggairahkan pengembangan investasi untuk mendukung program transmigrasi, maka pada awal Pelita IV dilaksanakan bentuk baru pengembangan PIR-BUN, yaitu PIR Akselerasi Kelapa Sawit melalui penugasan Menteri Pertanian kepada 5 perusahaan inti yaitu PTP II, IV, V, VI, dan VII masing-masing untuk pengembangan kelapa sawit seluas 100.000 Ha. Namun demikian komoditas masyarakat umumnya tetap berupa pohon karet meskipun sebagian masyarakat ada pula yang beralih ke komoditas kelapa sawit.

Menurut studi Nazir Salim, peralihan komoditas pertanian ke tanaman kelapa sawit ikut berhasil meningkatkan taraf ekonomi masyarakat transmigran di Provinsi Jambi, tepatnya pada tahun 1980-1990an ketika tanaman kelapa sawit memperoleh momentum kejayaannya bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi tanaman global. Selain itu, secara umum transmigrasi juga meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja di sektor pertanian,¹⁷ meskipun demikian, timbul berbagai kritik yang disebabkan oleh minimnya pembangunan dan pengembangan wilayah sekitar daerah transmigrasi dan belum maksimalnya kontribusi transmigrasi dalam pembangunan daerah. Dalam studi kritis, transmigrasi bahkan dianggap sebagai program sentralistik, deforestasi akibat pembukaan hutan yang masif, memindahkan kemiskinan, dan jawnisasi.¹⁸

3.2. Masyarakat Transmigran Jangga Baru

Program transmigrasi dengan daerah tujuan yang saat ini dikenal dengan Desa Jangga Baru berlangsung mulai dari November 1983 dengan memberangkatkan

¹⁵ PT Perkebunan Nusantara VI.

¹⁶ Syafruddin S, "Wawancara dengan Syafruddin S," wawancara di Desa Jangga Baru, 5 April, 2021.

¹⁷ Purwaka Hari Prihanto, "Penyerapan Tenaga Kerja di Pedesaan Provinsi Jambi," Laporan Penelitian (Jambi: Balai Penelitian Universitas Jambi, 1993), 15.

¹⁸ M. Nazir Salim, "Transmigrasi dan Hak Kewarganegaraan Agraria," dalam *Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2019), 87.

transmigran secara bertahap.¹⁹ Dengan demikian, Program transmigrasi masyarakat Jangga Baru masuk pada Pelita III (1 April 1979 - 31 Maret 1984). Fokus pemerintahan Soeharto pada masa ini masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih kuat pada segi pemerataan salah satunya melalui penguatan program Transmigrasi. Pada periode Pelita III ini pula transmigrasi mengalami puncak kejayaannya, terdapat 535.000 keluarga (hampir 2,5 juta jiwa) melakukan transmigrasi.²⁰

Masyarakat Desa Jangga Baru berasal berbagai masyarakat daerah di pulau Jawa dan masyarakat sekitar daerah pemukiman, yaitu masyarakat Melayu Jambi yang statusnya juga disebut sebagai transmigran. Sebelum transmigran asal Jawa tiba di pemukiman, transmigran yang berasal dari Provinsi Jambi terlebih dahulu menempati Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

Transmigran asal Jawa mulai tiba di Provinsi Jambi yang kedatangannya terbagi menjadi enam gelombang, pertama transmigran asal Banyuwangi, kedua dari Cianjur dan Purwakarta, ketiga Nganjuk, keempat dari Kebumen, Klaten, dan Pati, kelima dari Brebes dan Semarang, serta, keenam dari Jember.²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat transmigran di desa Jangga Baru berasal dari masyarakat lokal Provinsi Jambi dan dari tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, tepatnya dari Banyuwangi Nganjuk dan Jember, kedua Jawa Barat, yaitu dari daerah Cianjur dan Purwakarta, dan yang ketiga dari Jawa Tengah, dari daerah Kebumen, Klaten, Pati, Brebes dan Semarang. Hal ini sejalan dengan artikel *Kompas* 13 Maret 1984, "Transmigran peserta PIR yang ditempatkan bulan November-Desember 1983 berjumlah 492 KK, berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat."²²

Berdasarkan data kantor statistik Provinsi Jambi, pada tahun 1989 di pemukiman Transmigrasi ini terdapat 500 Kepala keluarga yang telah ditempatkan, dengan rincian 150 KK asal Jawa Timur, 51 KK warga lokal Provinsi Jambi, 99 KK asal Jawa Barat dan 200 KK asal Jawa Timur.²³ Keberangkatan para transmigran dari pulau Jawa menuju daerah penempatan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Pada saat itu, pemerintah memiliki perhatian yang cukup intens terhadap program transmigrasi, penyuluhan gencar dilakukan di pulau Jawa. Sebelum diberangkatkan ke daerah penempatan para calon transmigran bahkan diberi pelatihan dan pembinaan di daerah asal.

¹⁹ Imam Barowi, Wawancara dengan Imam Barowi, Transmigran Asal Jawa Tengah, Wawancara di Desa Jangga Baru, April 3, 2021.

²⁰ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Guide Arsip Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto 1967-1998* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2018).

²¹ Wawancara dengan Imam Barowi, Transmigran Asal Jawa Tengah.

²² "Meninggalkan Lokasi, 18 KK Transmigran Peserta PIR," *Kompas*, 13 Maret 1984, sec. Berita.

²³ Kantor Statistik Propinsi Jambi, "Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 1990," Publikasi, Juni 1992, 101.

Adapun yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transmigrasi utamanya adalah faktor ekonomi, di Pulau Jawa mereka tidak memiliki lahan pribadi sebagai tempat tinggal bahkan untuk kebutuhan pangan sulit terpenuhi.²⁴ Dengan penyuluhan yang gencar dilakukan, calon transmigran mengetahui bahwa mereka akan memperoleh lahan dan tanah pribadi dengan melakukan transmigrasi. Adanya kebutuhan dan kesempatan yang bertaut ini yang menjadi dasar terlaksananya program transmigrasi.

Menurut Barowi, ketika diberangkatkan, transmigran difasilitasi dengan empat pasang baju, sepatu bot, tas, dan alat-alat pertanian, bahkan sesampainya di daerah penempatan mereka diberi alat pertanian lagi. Hal ini sejalan dengan data *Evaluasi Standart Perbekalan Transmigran Berdasarkan Pola Pemukiman Transmigrasi* yang menyebutkan bahwa perbekalan transmigran terdiri dari tiga tingkatan. Pertama, di tingkat pusat, perbekalan terdiri dari alat pertanian seperti cangkul, parang dan arit, serta alat pertukangan seperti kampak. Kedua, di daerah asal transmigran memperoleh pakaian, peralatan tidur, peralatan dapur dan peralatan pertanian (garpu taman dan linggis) serta peralatan pertukangan seperti gergaji. Ketiga, di daerah penempatan, transmigran dibekali lagi dengan peralatan pertanian.²⁵



Gambar 3 : Transmigran asal Jawa Timur di Jangga Baru dengan alat pertanian yang diberikan pemerintah

Sumber : koleksi pribadi penulis

Setibanya di Unit Pemukiman Transmigrasi para transmigran telah mendapatkan rumah papan yang siap ditinggali di daerah pemukiman. Kebutuhan pangan para transmigran ditanggung oleh departemen transmigrasi selama tiga hari pertama kemudian para transmigran diberi bekal berupa uang (uang kemas-kemas) sebesar Rp. 27.500. (sekitar Rp. 1.400.000 untuk nilai saat ini dengan acuan harga beras pada masa itu seharga Rp. 250).

Lingkungan pada masa awal sangat gersang karena hutan memang dibabat habis untuk membuka pemukiman transmigrasi. Wilayah pemukiman yang cenderung berbukit menyebabkan sebagian transmigran yang tinggal di daerah yang cenderung lebih tinggi juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena

²⁴ Wawancara dengan Koni, Transmigran Asal Jawa Timur, Wawancara di Desa Jangga Baru, April 3, 2021.

²⁵ Pusat Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Departemen Transmigrasi RI, "Evaluasi Standart Perbekalan Transmigran Berdasarkan Pola Pemukiman Transmigrasi," Jakarta, 1992, 2.

meskipun telah disediakan sumur yang dijatahkan 1 sumur untuk setiap empat kepala keluarga, namun sumur tersebut belum menghasilkan air dengan maksimal.²⁶ Selain kesulitan air, kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok pangan, yaitu beras, juga sempat dialami oleh transmigran karena keterlambatan bantuan bahan pangan, namun menurut Koni, hal itu dapat disiasati dengan lebih berhemat dan menanam umbi-umbian seperti singkong dan buah-buahan seperti nanas di lahan pekarangan dan lahan pangan. Bahkan tanaman lahan pangan mengalami keberlimpahan sehingga banyak yang menjadi rusak karena membusuk. Transmigran tidak dapat menjualnya ke luar Unit Pemukiman Transmigrasi karena sulitnya akses transportasi pada saat itu.

3.4. Perkembangan Jangga Baru: Dari UPT hingga Terbentuknya Desa Definitif

Pada masa Jangga Baru sebagai Unit Pemukiman Transmigrasi, terdapat 500 kepala Keluarga²⁷ yang terdiri dari 90 persen transmigran dan 10 persen (50 Kepala Keluarga) warga lokal provinsi Jambi. 500 kepala keluarga ini terkoordinasi oleh satu pemimpin yang disebut dengan KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) dan dibantu oleh seorang PJS, yang mana kewasannya disebut sebagai unit satu. Hal ini dikarenakan PT. Perkebunan Nusantara VI Durian Luncuk dan Departemen Transmigrasi pada tahun 1980-an ini berhasil membentuk delapan unit kawasan transmigrasi yang kemudian masing-masing berkembang menjadi desa definitif.²⁸

Dalam pembinaan masyarakat yang baru terbentuk ini, departemen transmigrasi menunjuk Wilson Mallau sebagai KUPT yang memimpin kegiatan sosial kemasyarakatan. Sementara itu, dalam hal ekonomi sepenuhnya masyarakat transmigrasi bernaung kepada PT. Perkebunan Nusantara VI Durian Luncuk.

Pada masa pemerintahan Sugiatman sebagai KUPT, lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan seperti organisasi pemuda dan PKK mulai tumbuh dan berkembang.²⁹ Selama lima tahun, yaitu 1983 hingga 1988 masyarakat unit I bekerja sebagai di PTPN VI Durian Luncuk yang pada saat itu komoditasnya adalah karet. Transmigran laki-laki wajib bekerja di perkebunan inti dan dikoordinir dalam kelompok-kelompok tani. Sementara transmigran perempuan dapat bekerja secara suka rela dengan upah yang sama. Sistem kerja pada masa ini adalah per-hari dengan upah Rp. 1200, sedang harga beras per-kilogramnya adalah Rp. 250.³⁰ Jika dikonversikan pada masa kini, dengan acuan harga beras stabil kabupaten Batang Hari yaitu Rp. 12.650, maka upah hariannya adalah RP. 60.720. jumlah ini masih berada di bawah UMK

²⁶ Wawancara dengan Koni, Transmigran Asal Jawa Timur.

²⁷ "Laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Masjichun Sofwan S.H. Pada Sidang Pleno Khusus DPRD Propinsi Dati I Jambi Dalam Rangka Memperingati Ulang Tahun Propinsi Dati I Jambi Yang Ke XXIX" (Jambi, 6 Januari 1986), 52.

²⁸ Wawancara dengan Imam Barowi, Transmigran Asal Jawa Tengah.

²⁹ Wawancara dengan Imam Barowi, Transmigran Asal Jawa Tengah.

³⁰ Wawancara dengan Koni, Transmigran Asal Jawa Timur.

(Upah Minimum Kabupaten) masa kini yang per-harinya senilai Rp. 88.301 dengan UMK per-bulan Rp. 2.649.034. Rendahnya upah serta berbagai kesulitan hidup yang di tempuh menyebabkan 18 KK transmigran memutuskan untuk meninggalkan lokasi pemukiman.³¹

Para transmigran yang meninggalkan pemukiman mayoritas adalah yang berasal dari Jawa Barat³² Menurut Juwairiyah, transmigran Jawa Barat banyak yang meninggalkan lokasi pemukiman karena kondisi dan keadaan di daerah asal mereka lebih menguntungkan, yaitu wilayahnya yang lebih dekat dengan perkotaan³³ (akses ke kota lebih mudah) dan tanah yang lebih subur untuk bersawah, sementara di daerah transmigrasi PIR Jangga Baru mereka harus menjadi petani perkebunan karet. Berbeda dengan transmigran Jawa Barat, transmigran asal Jawa Tengah justru lebih merasa diuntungkan dengan program transmigrasi PIR, hal ini menyebabkan mereka banyak mengajak dan membawa keluarga di tanah Jawa (Jawa Tengah, khususnya daerah Klaten) untuk ikut ke pemukiman transmigrasi PIR Jangga Baru. Hal ini disebabkan karena para transmigran asal Jawa Tengah, khususnya Klaten berasal dari daerah yang sulit air dan wilayahnya cenderung sangat plosok, ditambah lagi dengan kesulitan dalam mencari penghidupan, oleh karenanya Jangga Baru dirasa lebih menguntungkan di banding daerah asal mereka sebab lapangan pekerjaan yang masih sangat terbuka di perkebunan inti. Selain itu meskipun di masa-masa tertentu penduduk yang tinggal di wilayah yang lebih ke perbukitan mengalami kesulitan air, namun pada daerah dataran yang lebih rendah, Jangga Baru dialiri oleh anak sungai Batang Hari yang disebut sebagai sungai Jangga. Anak sungai ini menjadi sumber air bersih alternatif pada musim kemarau di Jangga Baru ketika sebagian sumur-sumur yang telah disediakan mengalami kekeringan.

Kedua fenomena ini, yaitu transmigran Jawa Barat yang cenderung banyak meninggalkan lokasi pemukiman dan transmigran Jawa Tengah yang justru mengajak kerabat dan keluarga untuk ikut bertransmigrasi sejalan dengan teori Everett S. Lee yang mengemukakan bahwa kefaedahan wilayah (*Place Utility*) antara daerah asal dan daerah tujuan merupakan hal utama yang menjadi fondasi terlaksananya mobilisasi penduduk.³⁴

Pada masa wajib kerja transmigran di perkebunan inti, aktivitas perdagangan masih sangat minim, pedagang bukan berasal dari warga desa asli, akan tetapi para pedagang dari luar desa karena seluruh masyarakat dihimbau untuk bekerja sebagai petani, bahkan boleh dikatakan masyarakat dilarang untuk berdagang, sebagai halnya yang dikemukakan Imam Barowi

³¹ "Meninggalkan Lokasi, 18 KK Transmigran Peserta PIR," *Kompas* (Jambi, 13 Maret 1984), Berita, 8.

³² Wawancara dengan Ali Sukamto, Transmigran Asal Jawa Tengah, di Desa Jangga Baru, 24 Mei 2023.

³³ Wawancara dengan Juwairiyah, Transmigran Asal Jawa Tengah, di Desa Jangga Baru, 25 Mei 2023.

³⁴ Junaidi, "Perkembangan Desa-Desa Eks Transmigrasi dan Interaksi dengan Wilayah Sekitarnya serta Kebijakan ke Depan (Kajian di Provinsi Jambi)," 79.

“Kalo dulu baru, waktu baru-baru disini malah gak boleh kita usaha, selain kerja di PTP gak boleh, katanya kita suruh bertani bukan berdagang katanya (pihak PTPN VI Durian Luncuk), karena dulu PTP itu memang betul-betul masih membutuhkan tenaga kerja itu, kalo kita dagang itu kan, ada sumber ekonomi lain jadi malas kerja kesana, ngapain kita mburuh gitu.”³⁵

Meski demikian, menurut Barowi ada beberapa orang yang tetap nekat untuk berdagang sebagai usaha sampingan di samping bekerja sebagai buruh tani. Selain larangan untuk berdagang, masyarakat juga dilarang untuk menanami lahan pekarangannya dengan tanaman keras yang memiliki nilai ekonomis dengan alasan yang sama, yaitu kekhawatiran pihak perkebunan inti akan kekurangan tenaga kerja. Masyarakat baru menjadi lebih leluasa dalam mengelola lahan pekarangan dan lahan pangan miliknya setelah unit I bertransformasi menjadi desa definitif, sehingga mayoritas masyarakat menanami lahan pangan dengan pohon karet yang lebih bernilai secara ekonomis. Selain lebih ekonomis, kesulitan untuk menjual tanaman pangan juga menyebabkan pohon karet tidak hanya ditanam masyarakat di kebun plasma, melainkan juga di lahan pangan.

Organisasi masyarakat yang cukup berperan penting dalam pembentukan masyarakat Jangga Baru adalah kelompok tani. Pada awal tahun 1984 terbentuk 20 kelompok tani yang masing-masing kelompok beranggotakan 25 kepala keluarga. Kelompok tani dibentuk untuk memudahkan pembinaan masyarakat di bidang pertanian. Setiap dua kelompok tani dibina oleh satu mandor. Pada tahun 1984-1988, ketika masyarakat masih sepenuhnya bekerja di perkebunan inti, setiap kelompok tani mengadakan apel pagi untuk kemudian bersama-sama diberangkatkan menuju perkebunan inti dengan mengendarai truk.³⁶ Kelompok tani ini terus berlanjut meskipun masyarakat mulai menggarap jatah tanahnya masing-masing di tahun 1988. Kelompok tani tidak lagi bekerja sama untuk membangun perkebunan inti melainkan sebagai wadah koordinasi dalam menjual hasil pertanian berupa getah karet ke Koperasi Unit Desa untuk kemudian dijual ke Perkebunan Inti.

Pada tahun 1988, yaitu ketika lahan pertanian pemberian pemerintah yang komoditasnya berupa karet telah dapat digarap, masyarakat baru bekerja di lahannya masing-masing, tepatnya sebagai petani di lahannya sendiri, bukan lagi sebagai buruh. Getah karet yang dihasilkan dari masing-masing kebun milik petani diserahkan ke Koperasi Unit Desa yang hingga tahun 1993 dijual ke pihak perkebunan inti.

Pada tahun 1993, unit I pemukiman transmigrasi bertransformasi menjadi desa dengan kepala desa pertamanya Imam Barowi yang menjabat selama 6 tahun hingga tahun 1998. Pada masa ini aktor perekonomian mulai diperankan oleh masyarakat desa. Hal ini ditandai dengan dibangunnya pasar Jernang Serumpun di desa Jangga

³⁵ Wawancara dengan Imam Barowi, Transmigran Asal Jawa Tengah.

³⁶ Wawancara dengan Imam Barowi, Transmigran Asal Jawa Tengah.

Baru³⁷ Selain itu, lembaga pendidikan, kesehatan dan lembaga-lembaga sosial keagamaan menjadi lebih berkembang setelah unit I bertransformasi menjadi desa definitif.

3.5. *Perkembangan Masyarakat Jangga Baru dari segi Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Keagamaan*

Perkembangan perekonomian masyarakat Jangga Baru ditandai dengan dibangunnya pasar Jernang Serumpun. Pasar Jernang Serumpun merupakan pasar tradisional yang hadir setiap pekan di Jangga Baru tepatnya setiap hari Jumat. Pasar ini mulai ramai setelah ibadah salat Jumat selesai dilakukan hingga malam. Berbagai kebutuhan pokok seperti sembako, pakaian, makanan berat maupun ringan hingga permainan anak-anak tersedia di pasar ini. Para pedagang maupun pembeli di pasar ini tidak hanya masyarakat desa Jangga Baru saja, melainkan dari desa lain yang berada di sekitarnya. Para pedagang pakaian umumnya berasal dari kota Muara Bulian yang mayoritas merupakan orang Minang, sedangkan pedagang sembako biasanya berasal dari masyarakat setempat. Meski tidak sepenuhnya pedagang di pasar ini merupakan masyarakat Jangga Baru, pasar ini dapat mendongkrak aktivitas perekonomian masyarakat.

Selain pasar, setelah menjadi desa definitif, Koperasi Unit Desa Jangga Baru yang bernama Usaha Baru mulai menjual langsung hasil karet, sebagai komoditas utama masyarakat ke pabrik penerima, tidak lagi menjual ke perusahaan inti sebab perkebunan inti mulai beralih komoditas ke kelapa sawit.

Selama Jangga Baru telah menjadi desa difinitif pada masa Orde Baru, puncak keuntungan koperasi yang menjadi penopang kehidupan ekonomi masyarakat desa ini terjadi pada tahun 1994. Sisa Hasil Usaha (keuntungan bersih) pada tahun 1994 melonjak drastis yaitu dari yang hanya Rp. 5.336.193 di tahun 1993 menjadi sebanyak Rp. 142.953.709 di tahun 1994.³⁸ Di tahun 1995 SHU KUD Usaha Baru Desa Jangga Baru mengalami penurunan menjadi Rp. 83.531.836 dan semakin terjun bebas di tahun 1996 menjadi Rp. 5.572.210. Hal ini dikarenakan di tahun 1996 musim hujan yang berkepanjangan mengakibatkan jalanan rusak dan berakibat pada meningkatnya biaya transportasi dan penyusutan.³⁹ Selain itu, kuantitas getah karet yang dihasilkan juga mengalami penurunan karena musim hujan. Sementara di tahun-tahun berikutnya SHU KUD Usaha Baru tidak melampaui hasil di tahun 1994, yaitu Rp. 37.743.691 di tahun 1997 dan Rp. 13.555.681 di tahun 1998.⁴⁰

³⁷ Wawancara dengan Imam Barowi, Transmigran Asal Jawa Tengah.

³⁸ Agus Salim dan Ayi Suherman, "Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD 'Usaha Baru' Tahun Buku 1994" (Jangga Baru UPT I Durian Luncuk: Koperasi Unit Desa Usaha Baru, 28 Januari 1995).

³⁹ Agus Salim dan Muslim, "Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD 'Usaha Baru' Tahun Buku 1996" (Jangga Baru Durian Luncuk: Koperasi Unit Desa Usaha Baru, 7 Januari 1997).

⁴⁰ Baihaqi dan Muslim, "Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD 'Usaha Baru' Tahun Buku 1998" (Jangga Baru Durian Luncuk: Koperasi Unit Desa Usaha Baru, 25 Maret 1999).

Lembaga pendidikan dan kesehatan juga menjadi lebih berkembang. Di antaranya SD 262 bertransformasi menjadi SDN 131, kemudian dibangun pula SDN 138, SMPN 24 Batang Hari yang dahulunya merupakan SMP swasta di bawah naungan Yayasan Kasih Ibu, MTSN dan Madrasah Aliyah. Selain itu, ada pula lembaga pendidikan keislaman, Diniyah Takmiliah Awaliyah (DTA) di setiap dusun (RW). Lembaga ini mengajarkan pendidikan keislaman seperti Al-Quran Hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam dan bahasa Arab kepada siswa Sekolah Dasar yang mana kelas pada lembaga ini menyesuaikan dengan kelas Sekolah Dasar peserta didik.

Semasa masih berupa UPT, perintis dan tenaga pengajar pada lembaga-lembaga pendidikan di Jangga Baru merupakan para transmigran itu sendiri. Para perintis dan pengajar umumnya merupakan ketua rombongan ketika diberangkatkan dari Jawa. Setelah Jangga Baru menjadi desa definitif mulai didatangkan tenaga profesional yang mayoritas berasal dari Sumatera Utara, bersuku Batak.

Dalam hal kesehatan, poliklinik sederhana pada saat Jangga Baru masih berbentuk unit pemukiman transmigrasi (UPT) dapat bertransformasi menjadi Puskesmas Jangga Baru yang menjadi pusat kesehatan bukan hanya bagi masyarakat Jangga Baru saja, melainkan juga pada masyarakat desa yang berada di sekitar desa Jangga Baru. Selain itu terdapat pula lima buah Posyandu yang terletak di masing-masing dusun (RW) yang dalam menjalankan kegiatannya juga dibantu oleh kalangan ibu-ibu di sekitar sebagai kader posyandu.

Dalam hal sosial budaya, pada masa awal Jangga Baru menjadi desa definitif budaya tradisional masih sangat dijaga. Di antaranya kesenian rebana yang berasal dari masyarakat melayu Jambi yang dikelola oleh PKK, kesenian wayang kulit dan gamelan yang berasal dari Jawa dipertunjukkan pada malam hari ketika menyambut bulan Syura, yang mana pada siang harinya diadakan kegiatan bersih desa.⁴¹ Hal ini menunjukkan harmonisasi budaya berupa kesenian Melayu dan Jawa dapat berjalan secara beriringan di Jangga Baru.

Dalam hal sosial keagamaan, masyarakat Jangga Baru mayoritas beragama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen. Oleh karenanya dibangun dua buah Masjid yang merupakan jatah yang ditujukan sebagai sarana peribadatan masyarakat transmigrasi, yaitu Masjid Dar as-Salam dan al-Ikhlas. Karena kebutuhan masyarakat lambat laun semakin bertambah maka masjid Miftah al-Jannah yang dulunya musala dan masjid Bait As-Sajidin dibangun oleh masyarakat secara swadaya, sebagaimana keterangan dari bapak Mardiko yang bertempat tinggal di RW 3 desa Jangga Baru.⁴² Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah salat semata, lebih dari itu, masjid ini juga mengelola zakat masyarakat utamanya zakat fitrah, melaksanakan peringatan-peringatan keagamaan Islam seperti *isra' mikraj*, *maulid nabi* dan perayaan keagamaan lainnya. Selain masjid, setiap rukun tetangga

⁴¹ Wawancara dengan Imam Barowi, Transmigran Asal Jawa Tengah.

⁴² Wawancara dengan Mardiko, Dai Transmigran UPT Durian Luncuk I, di Desa Jangga Baru, 29 Maret, 2021.

(RT) memiliki musala yang berukuran lebih kecil. Jika masjid umumnya digunakan untuk menyelenggarakan ibadah salat Jumat dan hari raya idulfitri maupun iduladha, maka musala difungsikan untuk melaksanakan salat lima waktu bagi warga satu RT. Adapun Masyarakat non-muslim Jangga Baru, mereka biasanya melakukan aktivitas ibadah di desa lain. Hal ini disebabkan karena sangat minimnya kuantitas non-muslim di desa ini sehingga kriteria perizinan pembangunan rumah ibadah tidak terpenuhi.⁴³

Selain masjid bagi masyarakat muslim, di bidang sosial keagamaan terbentuk pula majelis taklim yang mewadahi para ibu rumah tangga untuk mendalami ajaran Islam. Pada awal mula terbentuknya majelis taklim dilakukan dengan mencakup lingkup desa kemudian diperkecil menjadi lingkup RW hingga akhirnya menjadi lingkup RT.⁴⁴ Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya demografi masyarakat, baik itu dari pendatang baru asal pulau Jawa yang melakukan transmigrasi spontan maupun pendatang lainnya. Selain sebagai wadah pengajian, majelis taklim yang diadakan setiap pekan dari rumah ke rumah masyarakat ini juga mulai mengadakan arisan bagi para ibu rumah tangga yang mengikuti kegiatan ini pada tahun 1997.⁴⁵ Hal ini menarik perhatian karena di samping sebagai suatu kearifan lokal di bidang keagamaan, majelis taklim juga menjadi sarana bagi ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan rumah tangganya melalui sistem arisan.

Masyarakat yang beragam di Jangga Baru dapat menyatu melalui sejumlah instalasi ritual keagamaan. Dalam upacara kematian misalnya, sejumlah transmigran yang beragama Muslim, akan terlibat aktif secara gotong royong membantu prosesi pemakaman warga yang wafat. Di malam harinya, diselenggarakan acara tahlil dan pembacaan Surat Yasin bersama selama tujuh hari. menjelang tibanya bulan Ramadhan, masyarakat setempat menyelenggarakan acara semacam *mungghahan*, yakni upacara doa bersama yang diakhiri dengan makan bersama. Momen ini juga digunakan untuk saling bermaafan, apabila di antara mereka ada kesalahan. Selepas acara ini, terdapat pemaknaan bahwa mereka akan menjalankan ibadah Ramadhan dengan baik, oleh sebab tidak adanya kesalahan yang mengganjal antara mereka dengan penghuni desa lainnya.

4. Penutup

Desa Jangga Baru merupakan salah satu desa di Provinsi Jambi yang terbentuk sebab dilaksanakannya transmigrasi pola Perkebunan Inti Rayat pada tahun 1983. Berbeda dengan konotasi desa yang penduduknya cenderung homogen, Jangga Baru memiliki penduduk yang heterogen sebab penduduk awalnya merupakan transmigran yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa (Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur), masyarakat Melayu Provinsi Jambi, orang-orang Minang dan sebagian masyarakat suku Batak dari Sumatera Utara.

⁴³ Wawancara dengan Imam Barowi, Transmigran Asal Jawa Tengah.

⁴⁴ Wawancara dengan Koni, Transmigran Asal Jawa Timur.

⁴⁵ Wawancara dengan Solekah, Transmigran Asal Jawa Timur, di Desa Jangga Baru, Mei 2023.

Perkembangan Desa Jangga Baru terlihat dari perkembangan status dari UPT menjadi desa definitif, perembangan perekonomian yang melibatkan koperasi desa, peningkatan infrastruktur dan pelayanan yang ada di desa, termasuk dengan munculnya majelis taklim untuk mendukung kegiatan keagamaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Guide Arsip Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto 1967-1998*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2018.
- Baihaqi, dan Muslim. "Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD 'Usaha Baru' Tahun Buku 1998." Jangga Baru Durian Luncuk: Koperasi Unit Desa Usaha Baru, 25 Maret 1999.
- Barowi, Imam. Wawancara dengan Imam Barowi, Transmigran Asal Jawa Tengah. Wawancara di Desa Jangga Baru, 3 April 2021.
- Departemen Transmigrasi RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi. "Evaluasi Standart Perbekalan Transmigran Berdasarkan Pola Pemukiman Transmigrasi." Jakarta, 1992.
- Direktorat Pendayagunaan Lingkungan Pemukiman Departemen Transmigrasi. "Hasil Pra Seminar Dampak Pelaksanaan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Terhadap Kesejahteraan Transmigran." Hasil Pra Seminar. Jakarta: Direktorat Pendayagunaan Lingkungan Pemukiman Departemen Transmigrasi, Desember 1990.
- Herlina, Nina. *Metode Sejarah*. Revisi 2020. Bandung: Satya Historika, 2020.
- Junaidi. "Perkembangan Desa-Desa Eks Transmigrasi dan Interaksi dengan Wilayah Sekitarnya serta Kebijakan ke Depan (Kajian di Provinsi Jambi)." Institut Pertanian Bogor, 2012.
- Juwairiyah. Wawancara dengan Juwairiyah, Transmigran Asal Jawa Tengah. Di Desa Jangga Baru, 25 Mei 2023.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. "Transmigrasi Mendukung Terwujudnya Desa Mandiri dan Percepatan Pertumbuhan Wilayah." Accessed June 14, 2022. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1863>.
- Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*. Cet. 2. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1987.
- Kompas*. "Meninggalkan Lokasi, 18 KK Transmigran Peserta PIR." 13 Maret 1984, sec. Berita.
- Koni. Wawancara dengan Koni, Transmigran Asal Jawa Timur. Wawancara di Desa Jangga Baru, 3 April 2021.
- Krismonita Sandi, Irhas Fansuri Mursal, and Fatonah Fatonah. "Dinamika Masyarakat Transmigrasi Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 1978-2016." *Jurnal Siginjai* 1, no. 1 (2021): 54-72.

- Laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Masjchun Sofwan S.H. Pada Sidang Pleno Khusus DPRD Propinsi Dati I Jambi Dalam Rangka Memperingati Ulang Tahun Propinsi Dati I Jambi Yang Ke XXIX." Jambi, 6 Januari, 1986.
- Madjid, Dien, and Johan Wahyudhi. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Kedua. Depok: Kencana, 2018.
- Mardiko. Wawancara dengan Mardiko, Dai Transmigran UPT Durian Luncuk I. Wawancara di Desa Jangga Baru, 29 Maret 2021.
- Permana, Sidik. *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Poespaningroem, Diah Eka. *Sipukat Solusi Perencanaan Transmigrasi*. Bogor: Zenawa Publishing House, 2021.
- Prihanto, Purwaka Hari. "Penyerapan Tenaga Kerja di Pedesaan Provinsi Jambi." Laporan Penelitian. Jambi: Balai Penelitian Universitas Jambi, 1993.
- PT Perkebunan Nusantara VI. "Unit Usaha Durian Luncuk - PTPN 6." Selayang Pandang. *ptpn6.com*, 2020. <http://ptpn6.com/statis-10/uuint-usaha-durian-luncuk.html>.
- S, Syafruddin. Wawancara dengan Syafruddin S, Pegawai PTPN VI Durian Luncuk. Wawancara di Desa Jangga Baru, 5 April 2021.
- Salim, Agus, dan Ayi Suherman. "Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD 'Usaha Baru' Tahun Buku 1994." Jangga Baru UPT I Durian Luncuk: Koperasi Unit Desa Usaha Baru, January 28, 1995.
- Salim, Agus, dan Muslim. "Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KUD 'Usaha Baru' Tahun Buku 1996." Jangga Baru Durian Luncuk: Koperasi Unit Desa Usaha Baru, January 7, 1997.
- Salim, M. Nazir. "Transmigrasi dan Hak Kewarganegaraan Agraria." dalam *Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Indonesia*, 87. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2019.
- Solekah. Wawancara dengan Solekah, Transmigran Asal Jawa Timur. Di Desa Jangga Baru, 24 Mei 2023.
- Sukamto, Ali. Wawancara dengan Ali Sukamto, Transmigran Asal Jawa Tengah. Di Desa Jangga Baru, 24 Mei 2023.
- Syamsu, M. Amral. "Penyelenggaraan Kolonisasi dan Transmigrasi." dalam *Transmigrasi dari Kolonisai Sampai Swakarsa*, 16. Jakarta: Gramedia, 1982.